

## **OPTIMALISASI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DESA MELALUI STRATEGI DIGITAL: STUDI PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA DALAM MENGHADAPI DISRUPSI INFORMASI**

<sup>1)</sup> Novita Intan Sari, <sup>2)</sup> Sri Lindawati

<sup>1,2</sup> Afiliasi Dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang

*dosen03136@unpam.ac.id; dosen03108@unpam.ac.id*

### **Abstrak**

Era digital telah menghadirkan lanskap informasi yang kompleks, perangkat desa kerap dihadapkan pada tantangan berupa misinformasi, disinformasi, dan kecepatan penyebaran berita yang tidak terverifikasi. Keterbatasan kapasitas digital dan pemahaman yang memadai mengenai strategi komunikasi yang efektif di platform digital dapat menghambat kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini melatarbelakangi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang yang berlokasi di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor pada hari Kamis, 25 September 2025 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi Pembangunan bagi Perangkat Desa dalam Menghadapi Tantangan Era Media Digital”. Kegiatan ini dihadiri oleh para perangkat desa, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, para Ketua RW dan RT, kader posyandu, para guru, dan tokoh lainnya. Kegiatan berlangsung dari pukul 13.00-16.00 WIB, yang diawali dengan pemaparan materi atau sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab sehingga mampu memberikan ruang bagi para perangkat desa perihal keluhan yang mereka rasakan dalam proses pembangunan di masyarakat. Setelah kegiatan tersebut, para peserta merasakan dapat memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan komunikasi pembangunan di masyarakat, hingga sikap dan strategi menghadapi banyak informasi di media digital saat ini.

**Kata Kunci : komunikasi, pembangunan, perangkat desa**

***Abstract***

*The digital era has presented a complex information landscape, village officials are often faced with challenges in the form of misinformation, disinformation, and the rapid spread of unverified news. Limited digital capacity and adequate understanding of effective communication strategies on digital platforms can hinder the ability of village officials to carry out development functions and public services. This condition is the background to the Community Service activity organized by the Communication Science Study Program at Pamulang University located in Desa Curug, Gunung Sindur District, Bogor Regency on Thursday, September 25, 2025 with the theme "Community Empowerment through Development Communication for Village Officials in Facing the Challenges of the Digital Media Era". The event was attended by village officials, including the Village Head, Village Secretary, Village Advisory Council Chairperson, RW and RT Chairpersons, integrated health post (Posyandu) cadres, teachers, and other key figures. The event lasted approximately two hours, beginning with a presentation and socialization, followed by a discussion and Q&A session, providing space for village officials to voice their concerns about the development process within the community. After the event, participants felt they had gained knowledge on how to conduct development communication within the community, as well as attitudes and strategies for dealing with the abundance of information available in today's digital media.*

***Keywords: communication, developments, village officials***

**PENDAHULUAN**

Komunikasi pembangunan merujuk pada penggunaan proses komunikasi yang terencana dan strategis untuk memfasilitasi perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan. Rogers (1976) mendefinisikan komunikasi pembangunan sebagai komunikasi yang dirancang untuk menyebarkan inovasi dan mendorong penerimaan serta adopsi oleh masyarakat. Komunikasi pembangunan berbeda dari komunikasi massa biasa karena memiliki tujuan yang spesifik, yaitu untuk mempromosikan perubahan yang diinginkan, baik dalam skala individu maupun kolektif. Berbagai teori telah berkembang dalam bidang ini, mulai dari teori difusi inovasi yang menekankan pada bagaimana ide-ide baru menyebar dan diadopsi (Rogers, 1962), hingga teori ketergantungan yang menyoroti peran komunikasi dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan global dan lokal. Pendekatan kontemporer dalam komunikasi pembangunan juga menekankan pada partisipasi, dialog, dan pemberdayaan masyarakat sebagai elemen kunci, bukan sekadar sebagai penerima informasi pasif (Servaes, 2008). Pada era digital, komunikasi pembangunan harus mampu beradaptasi dengan memanfaatkan kanal-kanal digital untuk memperluas jangkauan, meningkatkan interaktivitas, dan mendorong partisipasi yang lebih luas.

Komunikasi pembangunan memiliki peran sentral dalam proses pemberdayaan masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang lebih baik, memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengidentifikasi potensi dan peluang yang ada. Komunikasi pembangunan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*), membangun pengetahuan (*knowledge*), mengubah sikap (*attitude*), dan mendorong tindakan (*action*) yang konstruktif. Dengan menyediakan akses terhadap informasi yang akurat dan relevan, komunikasi pembangunan memberdayakan individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, menyuarakan aspirasi mereka, dan mengadvokasi kepentingan mereka. Pemberdayaan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan kultural, yang semuanya difasilitasi oleh alur informasi yang lancar dan terarah (Axelrod & Kincaid, 1999).

Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas lokal. Kapasitas lokal merujuk pada kemampuan suatu komunitas untuk mengenali, menganalisis, dan bertindak atas masalah-masalah yang dihadapi, serta untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kapasitas ini meliputi sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan, kesehatan), sumber daya

alam, sumber daya finansial, serta infrastruktur dan teknologi. Ketika kapasitas lokal meningkat, masyarakat menjadi lebih mandiri, adaptif, dan mampu mengelola sumber daya mereka secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Komunikasi pembangunan berperan penting dalam memobilisasi dan memperkuat kapasitas lokal ini, dengan memfasilitasi pertukaran informasi, pembelajaran, dan kolaborasi antar anggota masyarakat serta dengan pihak eksternal (Fung & Cowlshaw, 2007).

Dalam tataran desa, tokoh yang memiliki peran strategis adalah para perangkat desa. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa adalah sekelompok pejabat yang diangkat oleh kepala desa untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Namun realitasnya saat ini di era digital, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dalam hal kapasitas digital pada kalangan perangkat desa. Banyak dari mereka belum memiliki keterampilan dasar dalam mengoperasikan perangkat digital, mengakses internet secara efektif, maupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang relevan untuk pekerjaan mereka. Kurangnya pelatihan yang memadai, akses terbatas terhadap teknologi, serta usia dan latar belakang pendidikan yang beragam menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada kesenjangan ini. Akibatnya, potensi pemanfaatan teknologi digital untuk komunikasi pembangunan belum sepenuhnya tergarap. Pemberdayaan perangkat desa melalui peningkatan kapasitas digital menjadi krusial agar mereka mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang di era digital, serta mampu memitigasi risiko disrupsi informasi.

Salah satu desa yang berada di lingkaran Kampus Universitas Pamulang adalah Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Desa Curug merupakan salah satu desa yang berada di kawasan lingkaran Universitas Pamulang, berada di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil survei atau observasi awal yang dilakukan tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri dari dosen dan mahasiswa, maka ditemukanlah fakta di lapangan bahwa pemerintah Desa Curug, khususnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melakukan pembangunan di kawasan desa. Tugas mereka adalah sebagai agen perubahan sekaligus pelaksana teknis dalam program-program pembangunan, namun sayangnya sumber daya mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga masih diperlukan pengetahuan dan keterampilan perihal cara



berkomunikasi yang efektif perihal penyampaian dan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tim Dosen Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema” Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi Pembangunan bagi Perangkat Desa dalam Menghadapi Tantangan Era Media Digital”.

**METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi melalui pemaparan materi tentang komunikasi pembangunan efektif dan juga tanya jawab. Proses dilakukan dengan pendekatan model komunikasi interaksional agar proses komunikasi berjalan lebih efektif dan juga mampu mengajak peserta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Badan Pertimbangan Desa, para Ketua RW dan RT, Kader Posyandu, Para Guru, dan tokoh masyarakat lainnya. Kegiatan ini kami lakukan di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur karena desa ini secara lokasi dengan dengan Kampus 2 Universitas Pamulang.

Kegiatan ini juga diselenggarakan berbarengan dengan kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa sehingga para tokoh penting desa banyak yang hadir dalam kegiatan ini. Sebagai informasi, bahwa kegiatan Musrenbang Desa merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diatur dalam Permendes, PDTT No.21 Tahun 2020 dan ketentuan mengenai Musrenbang Desa juga disebutkan dalam Permendagri No.114 Tahun 2014. Biasanya kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP Desa yang juga dihadiri oleh warga desa, lembaga kemasyarakatan, BPD, Pemerintah Desa, Camat dan Bhabinkamtibmas.

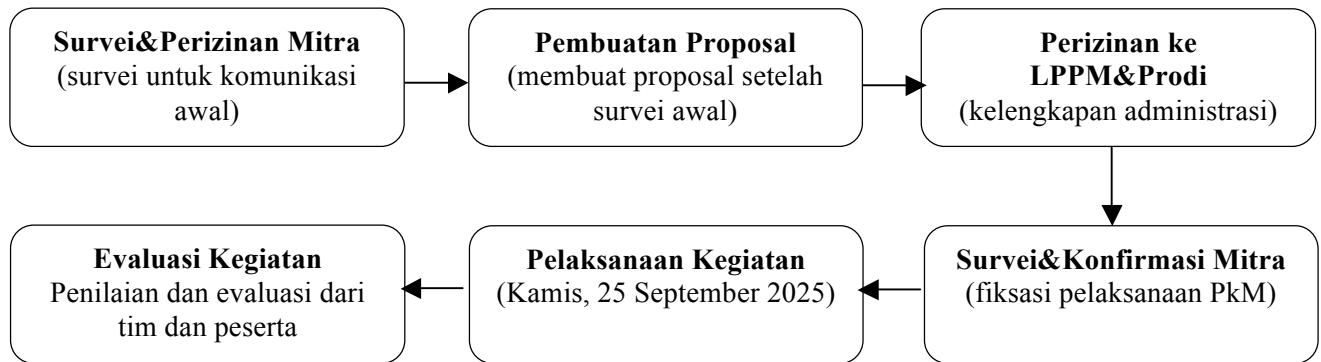
Tahapan kegiatan PkM dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama adalah tahapan survei dan perizinan. Dalam tahapan survei dan perizinan, tim melakukan komunikasi dan survei langsung ke lokasi untuk meminta izin sekaligus wawancara dan observasi singkat perihal profil, situasi, potensi dan permasalahan desa. Informasi awal, tim dapatkan dari Sekretaris Desa yang menyambut baik perihal rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tim juga melakukan perizinan dengan bagian LPPM dan Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang terkait dokumen pelaksanaan kesiapan program PkM ini.

Tahapan kedua adalah, adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada hari Kamis pukul 13.00-16.00 WIB. Kegiatan diawali dengan sambutan yang diwakili oleh Kepala Desa Curug, Bapak H. Edi Mulyadi yang menyambut baik kedatangan tim sekaligus menyampaikan harapannya kepada para perangkat desa agar terus semangat dan semakin meningkatkan kinerja. Setelah itu, sambutan kemudian diberikan oleh perwakilan tim sekaligus pemberian materi atau sosialisasi tentang komunikasi pembangunan efektif bagi para perangkat desa. Selesai pemaparan,

kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Beberapa peserta mengeluhkan tentang rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan pembanguna yang dilakukan, misalnya saat kegiatan posyandu atau gotong royong. Mereka juga ada yang mengeluhkan sering mendapatkan komentar dan perilaku negatif dari warga, misalnya jika ada bantuan dana dari pemerintah. Banyak warga yang berpikiran negatif jika terhadap perangkat desa.

Keluhan-keluhan dari para perangkat desa, semakin memperkuat bahwa proses pembangunan memang memerlukan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat, sehingga harapannya para perangkat des ini memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar tentang komunikasi pembangunan. Banyak perangkat desa membutuhkan pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas digital mereka. Pelatihan ini idealnya mencakup aspek praktis penggunaan teknologi, pemahaman tentang etika digital, serta strategi komunikasi yang efektif pada ruang digital, termasuk cara mengidentifikasi dan menangkal disinformasi. Pengembangan kapasitas digital bukan hanya tentang penguasaan alat, tetapi juga tentang membangun pola pikir adaptif yang memungkinkan mereka terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Selain kegiatan sosialisasi, dalam kegiatan PkM ini juga ditandatangani MoU atau perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang dengan pihak Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dalam hal pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk penguatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara keduanya. Adapun ruang lingkup Kerjasama yang disepakati adalah penyelenggaraan pendidikan, kolaborasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, kolaborasi dalam publikasi dan pengelolaan jurnal ilmiah, pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka, dan peningkatan suasana akademik. Tahapan ketiga adalah sesi evaluasi kegiatan, berupa penilaian saran dari peserta dan pihak desa tentang acara yang diselenggarakan. Berikut bagan tahapan kegiatan PkM yang dilaksanakan di Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.



Gambar 1. Alur Tahapan PKM

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Komunikasi Pembangunan dan Peran Perangkat Desa**

Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah 6,37 hektar dengan mayoritas mata pencaharian penduduk sebagai petani dan buruh. Jumlah penduduknya adalah 17.792 jiwa. Secara geografis, desa ini memiliki akses yang cukup baik terhadap jaringan internet, dengan mayoritas penduduk memiliki akses telepon pintar. Perangkat Desa Curug terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, tiga kepala urusan (pemerintahan, umum, dan keuangan). Usia rata-rata perangkat desa adalah 45 tahun, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi antara SMA hingga Sarjana. Mayoritas perangkat desa telah menjabat lebih dari lima tahun, sehingga memiliki pemahaman yang baik mengenai kondisi masyarakat dan dinamika pembangunan desa. Sebagian besar perangkat desa telah memiliki akses terhadap telepon pintar dan menggunakan media sosial berkomunikasi pribadi, namun pemanfaatannya komunikasi pembangunan masih bervariasi.

Sebagian besar perangkat desa di Curug memahami pentingnya komunikasi pembangunan pada era digital. Mereka mengakui bahwa media digital, terutama media sosial dan grup pesan instan, merupakan kanal yang efektif untuk menyebarkan informasi program pembangunan, pengumuman kegiatan, serta informasi penting lainnya kepada masyarakat. Beberapa perangkat desa menyatakan bahwa komunikasi digital memungkinkan penyampaian informasi yang lebih cepat dan luas dibandingkan metode konvensional. Namun, ada pula yang masih merasa lebih nyaman dan yakin dengan komunikasi tatap muka, terutama untuk isu-isu sensitif atau yang memerlukan penjelasan mendalam. Persepsi cenderung positif terhadap potensi digitalisasi komunikasi, namun diiringi dengan kekhawatiran akan tantangan yang menyertainya.

Tantangan terbesar yang dihadapi perangkat desa adalah maraknya penyebaran misinformasi dan disinformasi. Perangkat desa seringkali kesulitan membedakan antara berita yang benar dan hoaks, terutama ketika informasi tersebut disebarluaskan melalui grup *WhatsApp* yang tidak terkontrol. Hal ini berdampak pada kebingungan masyarakat dan terkadang menimbulkan keresahan. Beberapa perangkat desa mengaku pernah menerima informasi yang salah dan hampir menyebarkannya sebelum menyadari ketidakbenarannya. Kurangnya sumber daya dan waktu untuk melakukan verifikasi informasi secara mendalam juga menjadi kendala signifikan. Selain itu, literasi digital yang belum merata di kalangan perangkat desa membuat mereka rentan terhadap manipulasi informasi dan serangan siber yang lebih canggih.

Strategi komunikasi pembangunan yang diterapkan di Desa Curug masih bersifat campuran. Beberapa perangkat desa telah aktif menggunakan grup WhatsApp desa untuk menyebarkan informasi resmi, mengumumkan jadwal kegiatan, dan menjawab pertanyaan warga. Ada pula yang mulai memanfaatkan akun media sosial desa (jika ada) untuk mempublikasikan foto kegiatan pembangunan atau informasi pariwisata desa. Namun, sebagian besar strategi ini bersifat reaktif, yaitu hanya menyebarkan informasi yang telah ada tanpa strategi proaktif untuk merespons disrupsi informasi. Banyak perangkat desa menyatakan kebutuhan akan pelatihan mengenai cara membuat konten digital yang menarik dan akurat, serta strategi untuk melawan penyebaran hoaks. Kebutuhan akan platform komunikasi resmi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh semua perangkat desa juga diungkapkan.

Tingkat kapasitas digital perangkat desa di Curug bervariasi. Mayoritas memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan telepon pintar dan mengakses media sosial untuk keperluan pribadi. Namun, kemampuan dalam mengelola informasi secara profesional, memproduksi konten digital yang berkualitas, menggunakan aplikasi perkantoran digital, serta melakukan verifikasi informasi masih terbatas. Beberapa perangkat desa yang lebih muda atau memiliki latar belakang pendidikan tinggi menunjukkan kapasitas digital yang lebih baik, namun kesenjangan ini masih terasa. Kebutuhan akan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital, keamanan siber, dan keterampilan komunikasi digital menjadi sangat jelas.



Gambar 2. Pemaparan Materi tentang Komunikasi Pembangunan

Dari perspektif perangkat desa, pemanfaatan strategi digital dalam komunikasi pembangunan berpotensi besar dalam memberdayakan masyarakat. Dengan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses, masyarakat diharapkan menjadi lebih terinformasi mengenai program-program desa, sehingga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan. Perangkat desa melihat bahwa komunikasi digital dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Namun, mereka juga menyadari bahwa dampak positif ini hanya dapat tercapai jika disrupsi informasi dapat dikelola dengan baik. Pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, menurut pandangan mereka, juga memerlukan kemampuan masyarakat untuk memilah informasi dan tidak mudah termakan hoaks, yang juga membutuhkan pendampingan dari perangkat desa.

Perangkat desa biasanya setiap tahunnya selalu melakukan kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) guna membahas tentang rencana pembangunan dan anggaran desa. Kegiatan ini merupakan sarana rembuk antara perangkat desa dengan para tokoh masyarakat yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, sehingga perwakilan-perwakilan ini mampu menyampaikan harapan, masalah sekaligus usulan program yang hendak dijalankan. Musrenbang merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, bersama dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan, rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat mewujudkan pembangunan disegala bidang.



Gambar 3. Kegiatan Musrenbang Desa Curug

Dalam kegiatan PkM yang dilakukan, perangkat desa di Curug mulai menyadari dan menerapkan strategi digital dalam komunikasi pembangunan, sesuai dengan konsep komunikasi Pembangunan pada era digital yang menekankan pemanfaatan kanal-kanal digital (Rogers, 1976; Servaes, 2008). Penggunaan grup WhatsApp dan media sosial desa untuk penyebaran informasi dan pengumuman mencerminkan upaya optimalisasi jangkauan dan kecepatan komunikasi. Hal ini sejalan dengan karakteristik media digital yang interaktif dan aksesibel, yang dapat memperluas partisipasi masyarakat dan efektivitas penyampaian pesan pembangunan. Namun, kesadaran akan pentingnya strategi digital ini masih perlu dibarengi dengan penguasaan teknik yang lebih mendalam agar benar-benar optimal, bukan sekadar reaktif.

## **2. Hubungan Pemberdayaan Perangkat Desa dengan Kemampuan Mengatasi Disrupsi Informasi di Tengah Media Digital**

Tantangan disrupsi informasi yang dihadapi perangkat desa sangat relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat (Rappaport, 1987). Perangkat desa yang kapasitas digitalnya terbatas akan kesulitan dalam mengontrol narasi informasi yang beredar, yang pada akhirnya menghambat kemampuan mereka untuk memberdayakan masyarakat secara efektif. Ketika perangkat desa tidak mampu memverifikasi informasi, mereka berisiko menyebarkan misinformasi, yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan perangkat desa melalui peningkatan kapasitas digital menjadi prasyarat penting agar mereka mampu menjadi agen penyebar informasi yang akurat dan terpercaya, serta memitigasi dampak negatif disrupsi informasi.

Signifikansi peningkatan kapasitas digital bagi perangkat desa sangatlah krusial, sebagaimana diindikasikan oleh temuan penelitian. Kesenjangan kapasitas digital yang ada menghambat optimalisasi komunikasi pembangunan. Perangkat desa yang memiliki literasi digital yang baik, kemampuan produksi konten, dan keterampilan verifikasi informasi akan lebih mampu memanfaatkan media digital untuk tujuan pembangunan. Hal ini sejalan dengan pentingnya kapasitas lokal dalam pemberdayaan (Fung & Cowlishaw, 2007), kapasitas digital merupakan salah satu komponen penting pada era kontemporer. Tanpa peningkatan kapasitas ini, komunikasi pembangunan akan terus terhambat oleh ketidakmampuan beradaptasi dengan lanskap media digital yang terus berubah.

Salah satu temuan menarik adalah adanya dualisme persepsi perangkat desa: di satu sisi mereka mengakui pentingnya komunikasi digital, namun sisi lain masih merasa nyaman dengan



metode tatap muka. Ini menunjukkan adanya transisi yang sedang berlangsung, di mana unsur tradisional dan digital dalam komunikasi pembangunan masih berjalan paralel. Kontradiksi ini juga dapat dilihat dari penggunaan media sosial untuk komunikasi pribadi yang intensif, namun minimnya pemanfaatan untuk komunikasi pembangunan yang terstruktur. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas digital tidak hanya perlu mencakup aspek teknis, tetapi juga penanaman kesadaran dan motivasi untuk mengintegrasikan media digital ke dalam tugas-tugas profesional mereka.



Gambar 4. Foto Bersama Kepala Desa Curug

Secara teoritis, temuan ini memperkuat argumen bahwa komunikasi pembangunan harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Keterampilan perangkat desa dalam mengelola informasi di era digital menjadi variabel mediasi penting antara strategi komunikasi dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, temuan ini menegaskan urgensi program pelatihan yang komprehensif bagi perangkat desa, yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis penggunaan alat, tetapi juga pada literasi digital, etika bermedia, dan strategi penanggulangan disinformasi. Rekomendasi untuk penyediaan platform komunikasi resmi yang terintegrasi juga menjadi implikasi praktis yang penting bagi pemerintah daerah.

Kapasitas digital perangkat desa menjadi jembatan krusial antara komunikasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di era media digital. Tanpa kapasitas digital yang memadai, perangkat desa akan kesulitan mengoptimalkan potensi media digital untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan secara efektif. Disrupsi informasi yang marak di era digital semakin mempertegas urgensi peningkatan kapasitas digital perangkat desa. Pemberdayaan

perangkat desa melalui peningkatan kapasitas digital akan membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap informasi digital, memitigasi dampak negatif disinformasi, dan pada akhirnya, menjalankan fungsi komunikasi pembangunan secara optimal guna mendorong pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya.

**KESIMPULAN DAN SARAN****KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berlangsung di Desa Curug Kecamatan Gurung Sindur Kabupaten Bogor dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi Pembangunan bagi Perangkat Desa dalam Menghadapi Tantangan Era Media Digital. Kegiatan ini dihadiri oleh para perangkat desa, mulai dari Kepala Desa, Ketua BPD, Para Ketua RT dan RW, kader posyandu, dan tokoh desa lainnya. Kegiatan diselenggarakan pada hari Kamis, 25 September 2025 pukul 13.00-16.00 WIB, diawali dengan pemaparan materi atau sosialisasi tentang komunikasi pembangunan yang efektif bagi perangkat desa sekaligus membekali mereka keterampilan berkomunikasi di era digital. Pemberdayaan perangkat desa di era digital ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas digital, yang mencakup literasi, keterampilan verifikasi, dan kemampuan adaptasi terhadap lanskap media, adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat di era digital tidak hanya bergantung pada akses informasi, tetapi juga pada kualitas dan keandalan informasi tersebut. Kebijakan pemberdayaan masyarakat perlu memasukkan elemen literasi digital dan ketahanan informasi sebagai komponen integral. Perangkat desa, sebagai fasilitator utama, harus diberdayakan terlebih dahulu agar dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengelola arus informasi dan mendorong partisipasi masyarakat yang terinformasi.

**SARAN**

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka berikut beberapa saran yang dapat kami sampaikan untuk pihak Desa Curug adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan adaptif mengenai literasi digital serta strategi komunikasi pembangunan di era digital bagi seluruh perangkat desa.
2. Mendorong penyediaan infrastruktur digital yang memadai dan platform komunikasi resmi yang terintegrasi.
3. Secara proaktif mencari kesempatan untuk meningkatkan kapasitas digital, berkolaborasi dalam berbagi pengetahuan dan praktik terbaik.
4. Mengintegrasikan modul-modul mengenai komunikasi pembangunan berbasis digital dan penanggulangan disinformasi ke dalam kurikulum pelatihan aparatur desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Axelrod, L., & Kincaid, D. L. (1999). *When the audience is the source: The role of communication in development*. Lawrence Erlbaum Associates.
- Fung, C. C., & Cowlshaw, S. (2007). *Community capacity building: Policy and practice in Australia*. Community Development Journal, 42(3), 272-285.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Rappaport, J. (1987). *Terms of empowerment: Empowerment as a heuristic concept*. American Journal of Community Psychology, 15(5), 507-525.
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of innovations*. The Free Press.
- Rogers, E. M. (1976). *Communication and development: The passing of a dominant paradigm*. In W. Schramm & D. L. Kincaid (Eds.), *Communication models for the study of mass information* (pp. 129-151). The Free Press.
- Servaes, J. (2008). *Communication for development and social change*. Sage Publications.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.